

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Pengadilan Negeri adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex facti*. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. Dengan ini, Pengadilan Tinggi juga termasuk *judex facti*. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti*. Dalam hal pembuktian, peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana dewasa ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus.

Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan pada akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas

kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang-barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.<sup>1</sup>

Saksi dalam pengertian sehari-hari adalah mereka yang melihat dan/atau tahu tentang suatu hal atau peristiwa.. Untuk membenarkan pernyataan yang dibuat, tidak jarang kita menyebut orang lain untuk ditanyai kebenaran tentang hal dinyatakan tersebut apabila terdapat keraguan, atau sekedar menguatkan asumsi telah terjadi hal sebagaimana telah dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan. Konteks pembicaraan saksi yang dimaksud disini adalah makhluk hidup yakni manusia. Mengapa makhluk hidup lainnya tidak termasuk kedalam konteks saksi adalah disebabkan hewan dan tumbuhan tidak mampu mengkodifikasikan apa yang dilihat dan/atau dirasakannya dalam bentuk bahasa atau berbagai macam kode yang mudah dipahami oleh manusia.<sup>2</sup>

Masalah keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 265

<sup>2</sup> Achie Sudarti Luluhima. 2001 *Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT Gramedia Indonesia. Hlm. 47

- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu

sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>3</sup>

Pada umumnya seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHAP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan untuk memberi kesaksian, sebagaimana di atur dalam Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Darwan Printis. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan. Hlm. 75

- 1) Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami. Bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga? Misalnya pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia<sup>4</sup>. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim

---

<sup>4</sup> Soemitro, Ronny Hanityo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 113

walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

Dalam hal lain juga dalam KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian, sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.” demikianpun Pasal 185 ayat (2) menegaskan “*keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*”.<sup>5</sup>

Argumentasi tersebut lebih kuat lagi jika diperhatikan doktrin dari: “*keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi suatu keterangan saksi dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri*”<sup>6</sup>. Yahya harahap<sup>7</sup> mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis testis nullus*).

---

<sup>5</sup> Lihat Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 16.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001. hlm. 22.

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau yang umum disebut dengan KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi yang dimaksud oleh KUHAP di atas telah “dirombak” oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, sehingga pemaknaan saksi dalam KUHAP, tidak melulu tentang apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dia alami sendiri, namun harus dimaknai pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.<sup>8</sup>

Keterangan saksi termasuk sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia, hal tersebut berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1), yang dimaksud dengan Alat bukti yang sah adalah:

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama, hlm. 84.

- a.Keterangan saksi;
- b.Keterangan ahli;
- c.Surat;
- d.Petunjuk;
- e.Keterangan terdakwa;<sup>9</sup>

Hal ini penting terkait apabila salah satu saksi meninggal dunia, sementara saksi yang dapat dihadirkan misalnya hanya dua, sehingga hanya satu saksi saja yang masih hidup, maka hal tersebut tidak semata-merta menyebabkan alat bukti menjadi kurang. Oleh karena keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, maka saksi melalui serangkaian pemeriksaan (biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan), diambil keterangannya oleh penyidik maupun pengadilan, kemudian setelah keterangan itu diberikan, maka saksi tidak terikat lagi dengan jalannya acara penyidikan atau persidangan, atau dapat melanjutkan kegiatannya masing-masing.

KUHAP juga memperbolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di hadapan persidangan. Pasal 162 KUHAP menyebutkan:

*“jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya*

---

<sup>9</sup> Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 271.



*atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”.*<sup>10</sup>

Pada dasarnya, meskipun sedemikian banyak yang bersaksi dalam pemeriksaan pembuktian, apabila keterangannya tidak berkualitas atau tidak dapat membuat terang suatu tindak pidana, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, KUHAP menyelaraskan antara kuantitas dengan kualitas dari saksi. KUHAP menyebutkan dengan tegas pada Pasal 183, yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut memberikan gambaran, bahwa setidaknya ada dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dari tersangka atau terdakwa.

Terkait dengan alat bukti keterangan saksi, batasan dua alat bukti tersebut diperkuat lagi pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

*“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.*

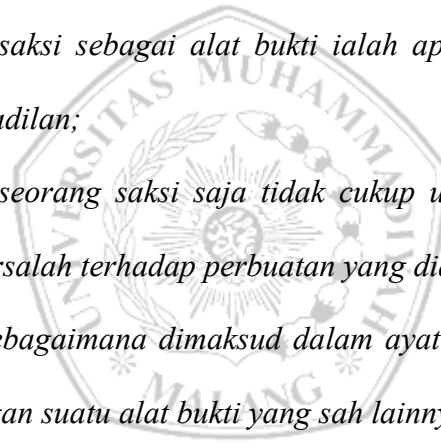
Pasal 185 ayat (2) KUHAP merupakan “kristalisasi” asas hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi). Kesimpulannya, KUHAP

---

<sup>10</sup> Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara pidana jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hlm. 94.

secara tegas mengharuskan setidaknya dua alat bukti yang sah untuk menunjukkan kesalahan tersangka atau terdakwa, atau setidaknya ada dua orang saksi yang memberikan keterangan untuk terangnya terjadinya suatu tindak pidana. Setelah menjelaskan kuantitas saksi dalam pembuktian suatu tindak pidana, KUHAP menjabarkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait keterangan saksi, agar keterangan tersebut “berkualitas”.

Adapun patokan “kualitas” dari keterangan saksi, dapat dilihat dalam Pasal 185 KUHAP, yakni sebagai berikut:

- 
- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;*
  - (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;*
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;*
  - (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri - sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;*
  - (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;*

*(6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:*

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain;*
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*

*(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>11</sup>*

Kemudian, untuk menjadi saksi, maka keadaan orang tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan yang dimaksud dalam Pasal 168 KUHP, dimana pasal tersebut tidak memperbolehkan (dan dapat mengundurkan diri) sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*

---

<sup>11</sup> Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 48

- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga*
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.*

Pada alat bukti kesaksian “tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna” (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*). Tegasnya, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, atau dengan singkat dapat dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan tidak “menentukan” atau “tidak mengikat”.

Sejak 1981 Hukum Acara Pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menghargai harkat dan martabat masyarakat untuk memberi perlindungan hak-hak pihak yang bersangkutan dalam perkara pidana. Untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum, maka seluruh tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat harus diproses secara hukum, hal ini

berarti bahwa semua jenis perkara pidana yang terjadi tidak boleh lepas dari jeratan hukum. Proses penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian suatu perkara pidana berawal dari adanya suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat, kemudian adanya laporan mengenai tindak pidana tersebut kepada aparat yang berwenang yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan penyelesaian perkara pidana tersebut di dalam persidangan.

Proses dalam Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penuntutan di persidangan tugas Penuntut Umum membuktikan kebenaran dakwaan di dalam persidangan. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi, dalam perkara pidana proses penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan. Pada setiap proses perkara yang diselesaikan melalui pengadilan, masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat penting.

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga dapat diketahui siapa yang bersalah dan tidak bersalah. Dengan adanya pembuktian, akan dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi orang yang tidak bersalah. Demikian pula pembuktian di depan persidangan perkara tindak pidana Pemerkosaan, penuntut umum yang mewakili negara untuk menuntut terdakwa di depan persidangan mempunyai tugas untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan yang diajukannya. Dikatakan di depan persidangan Penuntut Umum

kedudukan dan sikapnya : *Een subjective beoordeling van objective positie*, maksudnya Penuntut Umum sebagai wakil negara menyadarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara, walaupun demikian Penuntut Umum harus objektif artinya bila sidang tidak cukup alat bukti atas kesalahan terdakwa maka Penuntut Umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan, walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mendasarkan pada kekuatan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Demikian pula dalam tindak pidana pemerkosaan, Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya dipergunakan alat-alat bukti diantaranya keterangan saksi. Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang pelik pembuktiannya. Dikatakan demikian oleh karena tempat terjadinya perkara sengaja ditentukan oleh pelaku tindak pidana di tempat tertentu yang memungkinkan perbuatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, yang memungkinkan pihak yang melihat, mendengar adanya Pemerkosan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berkompeten. Selanjutnya apabila perkara yang telah dilaporkan tersebut ditindak lanjuti bahwa pihak pelapor akan berperan sebagai saksi.

---

<sup>12</sup> Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 11

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yan bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat “menerima” atau “menyingkirkannya”.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dapat diartikan bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim harus mempunyai dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selanjutnya dua alat bukti tersebut harus didukung dengan keyakinan hakim untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kasus yang kasuistik, maksudnya tindak pidana pemerkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi. Dalam membuktikan telah terjadi atau belumnya tindak pidana pemerkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud dalam hal ini yaitu tidak

terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja, serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak ia lakukan atau terdakwa selalu berkelik bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka-sama suka. Dalam hal ini hakim akan sangat sulit untuk membuktikan dan memutus perkara tersebut. Begitu penting dan kompleksnya alat bukti saksi dan putusan pengadilan dalam perkara pidana Pemerkosaan, sehingga menarik untuk dibahas.<sup>13</sup> Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieelwaarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Dari uraian diatas maka Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“URGENSI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi alat bukti saksi dalam perkara pidana Pemerkosaan menurut KUHAP?

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 dan 5 KUHAP, Yakni untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.



2. Apa saja unsur alat bukti saksi dalam perkara pidana Pemerkosaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui urgensi alat bukti saksi dalam perkara pidana Pemerkosaan menurut KUHAP.
2. Mengetahui apa saja unsur alat bukti saksi dalam pembuktian perkara pidana Pemerkosaan.

### **D. Manfaat**

- a. Penelitian Hukum Ini sebagai sayarat penulis memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

### **E. Kegunaan**

Bagi Masyarakat diharapkan dapat dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pandangan secara subjektif terkait urgensi ketentuan alat bukti saksi dalam perkara pidana menurut KUHAP. Bagi Pemerintah dapat dijadikan salah satu bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi para pengambil keputusan dan para pembuat kebijakan pada pemerintahan saat ini.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya apabila memakai metodologi yang lengkap.

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian<sup>14</sup>. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>16</sup> Berdasarkan ruang lingkup dan indentifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil ialah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

Peneletian Yuridis difokuskan terhadap Alat Bukti Saksi yang menunjukkan telah terjadi tindak pidana sehingga membuktikan semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan yuridisnya. Artinya, semua unsur tindak pidana dakwaan telah terdapat (istilah dalam praktik, terbukti) dalam peristiwa yang telah dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain, tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi.

Adapun penelitian normatifnya dengan mengkaji Pasal 184, Pasal 185 KUHAP mengenai alat Bukti yang sah dimana dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Keterangan Saksi dapat menjadi alat bukti yang sah. Alat bukti keterangan Saksi dalam persidangan merupakan salah satu syarat sahnya hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan, untuk itu perlu ditambahkan yakni alat bukti seperti (keterangan saksi,

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

keterangan ahli, petunjuk) diambil salah satu. Kekuatan hukum terhadap alat bukti dalam hukum pidana (KUHP) sebagai obyek materiil seperti barang atau benda ini dipandang lebih akurat nilainya, sebaliknya barang bukti materiil ini tidak ada nilainya apabila tidak diidentifikasi oleh para saksi dan terdakwa, sehingga memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari penguatan alat bukti tersebut.

## **2. Jenis Bahan Hukum**

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>17</sup> ”bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu”. Bahan-bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain KUHP.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini dapat berupa Buku-buku Hukum, Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa yang relevan dengan pokok bahasan penulisan hukum ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus dan Ensiklopedia Hukum, Blog, Website, Internet dan lain-lain.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penulisan ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan bertujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum tugas akhir ini adalah dilakukan melalui model studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hlm. 117.

<sup>19</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

penelitian hukum normatif. Informasi tersebut didapat dari beberapa perpustakaan yang ada di perguruan tinggi, dan *browsing* internet, dan *website*.

#### **4. Analisa Bahan Hukum**

Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai analisa dengan teknik preskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode untuk menjelaskan secara singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang tersusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal *das sollen* dan kenyataan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Rumusan masalah yang diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah pembuatan penulisan hukum ini.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan kajian-kajian teoritik terkait Teori Negara Hukum, Teori Hukum Acara Pidana, dan Teori Pembuktian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan ditulis, yang mana nanti akan dijadikan landasan analisis hukum penulisan di bab selanjutnya yakni Bab III pembahasan.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek kajian dalam penulisan, fokus permasalahan yang dikaji dalam bab ini mengenai Penegakan hukum terhadap urgensi ketentuan alat bukti saksi dalam perkara pidana menurut KUHAP. diuraikan dengan sistematika penulisan serta penggunaan bahan hukum yang telah disebutkan diatas, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan Bab III, dan berisikan saran atau rekomendasi penulis terhadap permasalahan yang diangkat serta menjadi masukan yang bermanfaat terhadap pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.